

Sistem Akuntansi Lingkungan Pada Industri Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah

Oleh: Alexander Candra dan M. Imam Sundarta

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana proses alur proses akuntansi lingkungan pada sebuah Perusahaan Industri Perkebunan Sawit dalam rangka untuk mengatasi kerusakan Lingkungan. Pengelompok biaya atau aktiva sebuah organisasi perusahaan Industri Perkebunan Sawit.

Metodologi Penelitian; Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif yang menguraikan alur fakta sebuah pekerjaan. Dimulai proses pencatatan sampai dengan Laporan Keuangan. Data dipergunakan adalah data primer berdasarkan observasi langsung proses pencatatan akuntansi lingkungan. Data sekunder adalah data-data pihak lainnya berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Menemukan sebuah alur proses pencatatan akuntansi lingkungan pada perusahaan Industri, sebagaimana digambarkan sebuah alur implementasi. Umumnya dipergunakan pada Perusahaan Industri Perkebunan Sawit Lainnya.

Kekurangan Penelitian ini, Dimana penelitian hanya berada satu lokasi dan wilayah perusahaan Industri Lingkungan Perusahaan Sawit, sehingga tidak merupakan pedoman sistem akuntansi lingkungan. Diharapkan penelitian lainnya dapat menambah pada Industri Perkebunan lainnya terletak lokasi berbeda.

Keaslian didalam penelitian ini, diharapkan akan menghasilkan dampak sebuah alur pencatatan akuntansi lingkungan. Merupakan sebuah contoh bahwa perusahaan Industri Perkebunan sawit sangat perhatikan kerusakan lingkungan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 2006 Indonesia sudah menjadi produsen **minyak kelapa sawit mentah** (*Crude Palm Oil/CPO*) terbesar di dunia, setelah Malaysia. Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 2015. Beberapa tantangan dibalik perkembangan pesat dan pemanfaat yang cukup tinggi

tersebut maka bermunculan masalah dan isu negatif pada produksi kelapa sawit, antara lain konflik lahan yang terjadi antara perusahaan kelapa sawit dengan dan masyarakat, kerusakan biodiversity, tekanan dari negara maju, seperti Amerika dengan menghembuskan isu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkebunan yang

dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab menjadi obyek objek serangan negara maju dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dengan dalih sebagai penyebab peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK). Emisi gas rumah kaca yang kemudian bisa mengetahui diketahui potensi dampaknya pada pemanasan global, perubahan iklim, *eutrophication*, *acidification*, dan kesehatan manusia. Di samping itu, permasalahan dan isu negatif tersebut negara-negara maju juga menetapkan standar pengurangan gas rumah kaca (GRK) menggunakan sumber daya energi terbarukan jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil agar Indonesia untuk bisa memasarkannya ke negara mereka. Uni Eropa menetapkan tahun 2017 sumber daya energi terbarukan harus bisa mengurangi gas rumah kaca sebesar 35% (*The European Parliament and of The Council*, 2009) dan Amerika Serikat menetapkan sebesar 20% (EPA, 2011).

Sektor agrikultur merupakan bagian paling penting dalam kegiatan

perekonomian Indonesia terutama karena sektor agrikultur menghasilkan devisa nonmigas melalui jalur Export ekspor. Hal ini dapat terlihat dari data Departemen Kementerian Pertanian yang menyebutkan bahwa pemanfaatan lahan agrikultur di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, baik untuk aktivitas pertanian maupun perkebunan.

Tidak hanya itu menurut Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GAPKI) pada tahun 2013 sektor agrikultur juga telah mampu menyerap 38% tenaga kerja dan menyumbang 13% dalam perekonomian Indonesia, terutama sektor Industri perkebunan kelapa sawit. Di Indonesia perlu terus dikembangkan industri perkebunan sawit sebagai hasil produk yang paling utama untuk export ekspor adalah *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel Oil* (PKO). Peralannya adalah peningkatan volume ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel Oil* (PKO) beserta turunannya dapat menjadi penyelamat neraca perdagangan nasional

yang terus mengalami defisit. Hal ini perlu dilakukan untuk mengimbangi barang barang impor.

Berdasarkan berita *Republika Online* pada tanggal 1 Maret 2015 bahwa tahun 1990 produksi sawit Indonesia hanya 22 % dari produksi dunia. Sementara itu, produk Malaysia 55 % , persen dan produk negara-negara lain sebesar 23 %. Perlu diketahui bahwa sedangkan pada tahun 2010 produksi sawit Indonesia sudah mencapai 48 % . persen, Malaysia mencapai 39 persen, sedangkan negara hanya mencapai lainnya 13 % . persen. Akan tapi, saat ini ini negara

Indonesia sudah menjadi negara penghasil CPO yang terbesar di dunia dengan menggeser posisi Malaysia.

Pada tahun 2012 Indonesia menyumbang 49,9% dari total produksi CPO dunia. Sementara itu, konsumsi CPO dalam negeri hanya 7,1 juta ton sisanya diekspor ke berbagai negara seperti India dan Cina, dan berbagai negara lainnya. CPO menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan nonmigas Indonesia sebagai penyumbang pendapatan negara Tabel 1.1 berikut ini memperlihatkan bahwa Indonesia sudah menjadi *leader* dunia untuk produksi CPO.

Tabel 1.1
Produksi Sawit Dunia (1999 s/d 2007 dalam tons)

Negara	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Indonesia	6,250	7,050	8,080	9,370	10,600	12,380	14,100	16,060	16,800
Malaysia	10,554	10,842	11,804	11,909	13,355	13,876	14,962	15,881	15,824
Thailand	560	525	625	600	690.00	735	700	860	1,029
Nigeria	720	740	770	775	785.00	790	800	815	835
Colombia	500	524	548	528	527.00	632	661	713	780
Pn Guinea	264	336	329	316	326.00	345	310	365	395
Ecuador	263	218	228	238	262.00	279	319	352	335
Cote d'Ivoire	264	278	205	265	240.00	270	320	330	320
Costa Rica	122	137	150	128	155.00	180	210	193	215
Honduras	90	101	130	126	158.00	170	180	195	205
Brazil	92	108	110	118	129.00	142	160	170	190
Guatemala	53	65	70	36	35.00	37	92	125	137
Venezuela	60	70	52	55	41.00	61	63	65	76
Others	833	873	883	895	906.00	940	969	1,023	1,064
TOTAL	20,625	21,867	23,984	25,359	28,209	30,837	33,846	37,147	38,205

Sumber :Oil World Annual (2007)& Oil World Weekly(14 December.2007)

Pemasaran hasil produksi dari industri perkebunan sawit diutamakan untuk konsumsi dalam negeri dan sisanya untuk ekspor ke negara-negara Asia dan Eropa. Menurut data Gabungan Pengusaha Perkebunan Sawit Indonesia (GAPKI), selama ini ekspor telah menjadi bantalan bagi defisit neraca perdagangan nasional. Sumbangsih sawit beserta turunannya

dalam struktur ekspor itu sangat *besar*, yaitu sekitar 13% dari total ekspor Indonesia. Untuk melihat pemasaran produk CPO ke pertama adalah negara India, Malaysia, dan Tiongkok menjadi konsumen terbesar. Untuk itu, perincian daftar negara pengimpor CPO dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Export CPO 2008-2013

No.	Negara	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Cina	1766.9	2645.4	2174.4	2032.8	2842.1	2343.4
2	Singapura	600.9	659.9	696.8	737.2	952.1	844.0
3	Malaysia	745.5	1195.7	1489.7	1532.6	1412.3	514.3
4	India	4789.7	5496.3	5290.9	4980.0	5253.8	5634.1
5	Pakistan	409.7	214.6	90.3	279.2	749.1	1080.3
6	Bangladesh	506.8	800.5	771.2	804.9	743.5	655.4
7	Sri Lanka	48.4	5.8	12.7	25.4	10.8	29.4
8	Mesir	495.9	497.2	488.7	790.7	494.1	735.5
9	Belanda	1295.9	1364.3	1197.3	873.0	1358.3	1361.4
10	Jerman	404.8	461.5	379.3	263.6	219.5	283.1
11	Lain-lain	3226.2	3488.0	3700.6	4116.8	4809.4	7097.1
Jumlah		14290.7	16829.2	16291.9	16436.2	18845.0	20578.0

Sumber: BPS Pusat Jakarta

Pada Tabel 1.2 terlihat cermin bahwa negara-negara bagian Eropa, seperti Jerman dan Belanda mengalami fluktuasi. Kecenderungan berkurang atau menurun untuk impor produk *Crude Palm Oil* CPO

dari Indonesia hal ini dapat menyebabkan harga *Crude Palm Oil* CPO dari menurun.

Pada sisi lain hasil CPO merupakan penyumbang sumbangan penerimaan negara khusus di bidang penerimaan pajak ekspor. di Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai, Kementerian Keuangan mencatat sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 penerimaan bea keluar untuk CPO adalah sebesar Rp3,19 triliun dari total penerimaan bea keluar sebesar Rp5,9 triliun. Total penerimaan bea keluar pada akhir Mei 2013 turun 37% jika dibandingkan dengan periode yang sama di pada tahun sebelumnya. Sampai akhir tahun 2013 target penerimaan bea keluar negara adalah sebesar Rp17,6 triliun, turun

dari target sebelumnya sebesar Rp 31,7 triliun.

Hal ini disebabkan oleh harga *Crude Palm Oil* CPO harga dunia turun, sedangkan tarif pajak bea keluar berdasarkan harga pasar dunia. Dari total target penerimaan bea keluar di akhir tahun ini, porsi produk *Crude Palm Oil* CPO adalah sebesar 92% atau setara Rp11,1 triliun. Hal ini terlihat menunjuk pada Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3		
Penerimaan Bea Keluar dari Ekspor Crude Palm Oil (CPO)		
dan turunannya		
Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp.Triliun)	Akumulasi Penerimaan (Rp.Triliun)
2007	4.20	4.20
2008	13.60	17.8
2009	0.60	18.4
2010	8.90	27.3
2011	28.90	56.2
2012	23.20	79.4

Sumber: ABPN 2013 (Kementerian keuangan)

Sesuai dengan iklim tropis, curah hujan yang cukup dan tanah sangat subur kaya dengan humus, hamparan daratan luas belum dimanfaatkan secara maksimal, jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai, serta negara kepulauan, maka

potensi Indonesia Indonesia sangat cocok untuk budi daya sawit dan mampu untuk terus- menerus berperan dalam ke pasar dunia komoditi.

Namun, pertumbuhan lahan untuk budi daya sawit setiap tahun semamgkin

semakin meningkat tajam dan pemanfaatan lahan-lahan yang awalnya untuk hutan primer kini dibuat untuk lahan perkebunan sawit karena adanya diversifikasi produksi untuk produksi biodiesel. Adapun luas lahan budi daya sawit sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2013 tumbuh sangat pesat, di mulai dimulai sejak tahun 1996--1997 yang

mencapai pertumbuhan 216%, tetapi namun mengalami stagnasi pertumbuhan pada akhir tahun 2011--2013 sebesar 110%. Jika dilihat data-data tersebut, kemungkinan problematika yang terjadi adalah penurunan luas lahan sawit mengalami stagnasi cukup lama, 3 tahun, seperti terlihat dalam tabel berikut. Data berikut berasal dari Biro Pusat Statistik (BPS) seperti yang terjadi dalam Tabel 1.4

Tabel 1.4
Luas Perkebunan sawit dari tahun 1993-2013 (Ha.000)

Tahun	Jumlah	Akumulasi	%
1995	992.40	992.40	100%
1996	1,146.30	2,138.70	216%
1997	2,109.10	4,247.80	199%
1998	2,669.70	6,917.50	163%
1999	2,860.80	9,778.30	141%
2000	2,991.30	12,769.60	131%
2001	3,152.40	15,922.00	125%
2002	3,258.60	19,180.60	120%
2003	3,429.20	22,609.80	118%
2004	3,496.70	26,106.50	115%
2005	3,593.40	29,699.90	114%
2006	3,748.50	33,448.40	113%
2007	4,101.70	37,550.10	112%
2008	4,451.80	42,001.90	112%
2009	4,888.00	46,889.90	112%
2010	5,161.60	52,051.50	111%
2011	5,349.80	57,401.30	110%
2012	5,995.70	63,397.00	110%
2013	6,170.70	69,567.70	110%

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS)/**Badan Pusat Statiastik**

Perusahaan industri perkebunan sawit juga memberikan sumbangan penerimaan negara dari sektor pajak ekspor serta banyak memberikan menciptakan lapangan pekerjaan yang merupakan program Pemerintah, yakni mendorong dan menciptakan untuk lapangan pekerjaan. Dengan demikian, ini dapat mengatasi pengangguran di Indonesia.

Industri perkebunan sawit juga dapat meningkatkan pendapatan para petani kelapa sawit dengan cara membeli tandan buah segar (TBS) sesuai dengan harga pasar atau lebih tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sekitarnya.

Pada Tabel 1.5 adalah menunjukkan bahwa peranan subsektor perkebunan terhadap sektor pertanian dalam pembentukan produk domestik

regional bruto (PDRB) Kalimantan Tengah sangat besar, yaitu sebesar 44,16 %. Sektor perkebunan didominasi oleh tanaman kelapa sawit yang dari tahun ke tahun selalu meningkat, hingga pada tahun 2012 menjadi komoditas ekspor luar negeri terbesar kedua dan pada tahun 2012. Ekspor olahan TBS menjadi CPO sebesar 273 Juta US\$, dan pada tahun 2013 luas areal (Ha) Industri Perkebunan Sawit 1.304.125,50, dan menghasilkan produksi CPO sebesar 2.548.829,45 ton, sedangkan untuk tahun 2012 tercatat 2012 luas areal (Ha) industri perkebunan sawit 858.433 dan produksi *Crude Palm Oil* CPO sebesar 5.005.252 ton. Adapun Tabel 1.5 berikut ini memperlihatkan perbandingan presentasi persentase antara tahun 2012 dan tahun 2013.

Tahun	Luas (ha)	%	Crude Palm Oil (CPO)	%
2012	858,433.00	40%	500,525.20	16%
2013	1,304,125.50	60%	2,548,829.45	84%
Jumlah	2,162,558.50		3,049,354.65	

Sumber: Biro Pusat Statistik Kaltan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka lahirlah sertifikat *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* di negara Eropa yang bertujuan untuk mengatasi kerusakan lingkungan akibat dari industri perkebunan sawit. RSPO merupakan asosiasi nirlaba yang menyatukan para pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri minyak sawit, yakni produsen produsen sawit, pemroses atau pedagang kelapa sawit, produsen barang-barang konsumen, pengecer, toko-toko, lembaga keuangan seperti bank, dan investor. Gagasan mulai pada tahun 2001 melalui organisasi internasional nirlaba, yaitu *World wide Fund for Nature (WWF)* yang memulai mengeksplorasi gagasan *roundtable* untuk minyak sawit berkelanjutan, yang diperkarsai diprakarsai oleh perusahaan Aarhus United UK Ltd, Golden Hope Plantations Berhad, Migros, Malaysian Palm Oil Association, Sainsbury's dan Unilever bersama *Worldwide Fund for Nature (WWF)* terjadi pada tahun 2002. Dari gagasan

tersebut timbul tersebut baru bisa dibentuk secara resmi *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* dengan tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk-produk minyak sawit berkelanjutan melalui standar global kredibel dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Dengan pandangan inilah, RSPO secara proaktif terlibat dengan petani kelapa sawit, pengolah sawit, perusahaan, pengecer, Lembaga Swadaya Masyarakat dan investor untuk bekerja sama menuju suplai global minyak sawit yang diproduksi dengan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*, akhirnya menetapkan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*. *Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPOS)* adalah suatu kebijakan yang bersertifikasi tentang lingkungan berkelanjutan, khususnya perusahaan industri perkebunan sawit. Hal tersebut berdasarkan

Kementrian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia, yakni untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan dan ekosistem. Sebagai salah satu produsen utama minyak sawit dunia Indonesia agar memiliki potensi yang cukup besar untuk terus-menerus berperan dalam dunia *Crude Palm Oil* CPO karena negara-negara Eropa telah memberlakukan embargo produk hasil pertanian dari Indonesia.

Sebagai tindak lanjutnya dan pedoman pelaksanaannya maka Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) pada tanggal 29 Maret 2011. Industri perkebunan sawit merupakan *mandatory* atau kewajiban

untuk melaksanakan pemeliharaan lingkungan dan harus melakukan akuntansi lingkungan (*Environmental Accounting*). Dalam kenyataannya *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) tidaklah menguntungkan bagi dunia perkebunan persawitan. Dengan adanya kebijakan penerapan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) hal ini menambah beban bagi perusahaan industri perkebunan sawit dan menambah biaya- biaya perusahaan, seperti biaya pemeliharaan tanaman mempunyai supaya ramah lingkungan (seperti pupuk bernuansa lingkungan), biaya penelitian lingkungan, biaya pengembangan lingkungan, biaya pengendalian lingkungan, dan biaya memberdayakan sumber daya ekonomi masyarakat sekitarnya. Untuk itu, diperlukan proses akuntansi lingkungan sehingga perusahaan dapat memberikan informasi pertanggungjawaban kepada Pemerintah, pemangku yang berkepentingan, dan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tertanggal 29 Maret 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) maka untuk perusahaan industri perkebunan sawit harus bisa menerapkan sertifikasi (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2014. Dan Selanjutnya, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 Pemerintah Indonesia telah menetapkan kembali adanya perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan terjadi perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan terdapat tambahan menambah dua pasal, yakni Pasal 108 dan Pasal 109, yakni adanya sanksi pidana terhadap pelaku pengusaha perkebunan yang melakukan pembakaran, merusak, dan/atau tidak merawat lingkungan akan dikenakan ancaman sepuluh tahun dan denda paling

banyak sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sehingga diharapkan agar para pengusaha industri perkebunan sawit tidak lagi semata-mata hanya mengejar keuntungan (*profit*), akan tetapi harus memperhatikan lingkungan dan yang berkelanjutan.

Dari alasan-alasan uraian tersebut diatas, maka sangatlah diperlukan sebuah akuntansi lingkungan yang dapat memberikan informasi sesungguhnya, seperti bagaimana perlakuan biaya - biaya yang berkaitan dengan lingkungan, bagaimana pengungkapan ,dan apa-apa saja yang seharusnya disajikan di dalam Laporan Keuangan Audit Independent (*Financial Statements and Independent Auditor's*) supaya perusahaan dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang, yaitu Pemerintah, pemangku yang berkepentingan, dan masyarakat sekitarnya.

Dengan adanya kerusakan lingkungan selama ini perusahaan industri

perkebunan sawit sudah sangat mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah agar untuk menjaga lingkungan, mengolah lingkungan, dan mengendalikan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan Peraturan-Peraturan pemerintah tersebut tentu akan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan industri perkebunan sawit. Untuk Biaya-biaya lingkungan tersebut harus dapat dicatat, diaudit, dan dibaca oleh pihak yang mempunyai kewenangan dalam kerusakan lingkungan. Adapun tujuan akuntansi lingkungan di dalam Laporan Keuangan Audit Independen (*Financial Statements and Independent Auditor's*) di perusahaan Industri perkebunan sawit adalah agar perusahaan dapat melaporkan atau memberikan informasi tentang kinerjanya dalam mengendalikan kerusakan lingkungan. Peraturan tersebut yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Kementerian Pertanian.

Bagaimana akuntansi lingkungan memberikan informasi kepada pihak yang

berwenang bahwa perusahaan industri perkebunan sawit telah mengeluarkan kas atau bank yang bertujuan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, biaya pengembangan lingkungan, biaya pengendalian lingkungan dan biaya mencegah kerusakan lingkungan supaya Agar pihak Pemerintah dan masyarakat umumnya mudah membaca standar baku umum dan bisa mengetahui bahwa perusahaan telah mematuhi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 67 tentang Fungsi Pelestarian Lingkungan Hidup.

Untuk biaya lingkungan, seperti biaya pengendalian lingkungan, biaya pengembangan lingkungan, dan biaya-biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tertanggal 29 Maret 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman umum atau buku petunjuk didalam melakukan praktik akuntansi, tetapi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi. Untuk pembuatan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengacu pada penafsiran dan penalaran teori-teori yang berlaku di dalam hal praktik pembuatan laporan keuangan yang tujuannya dapat memperoleh informasi tentang kondisi riil perusahaan sesungguhnya dan nilai ekonomi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bukan merupakan suatu kemutlakan bagi setiap perusahaan untuk mematuhi dan dilaksanakannya.

Akuntansi lingkungan lebih cenderung menyoroiti masalah aspek lingkungan yang terjadi atau dampak dari kegiatan secara teknis, misalnya pada saat penggunaan bahan baku perusahaan yang kemudian akan menghasilkan limbah produksi yang berbahaya bagi makhluk

lainnya, penggunaan alat-alat bisa menimbulkan kerusakan lingkungan sekitarnya, dan sebagainya. Menurut (Helvegja 2001) akuntansi lingkungan adalah dipatuhinya perundangan perlindungan lingkungan untuk menemukan efisiensi yang mengurangi dampak dan biaya - biaya lingkungan.

Akuntansi lingkungan ini merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan melaporkan akuntansi biaya lingkungan.

Akuntansi Lingkungan di dalam *Financial Statements and Independent Auditor's* (Laporan Keuangan Audit Independent) belum ada aturan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) khusus di bidang Akuntansi Lingkungan karena ini mempertimbangkan penilaian yang wajar dan *comparable* dengan perusahaan perkebunan lainnya yang mempunyai keselarasan didalam suatu laporan keuangan. Berkaitan dengan itu, penelitian ini berjudul "Biaya Akuntansi

Lingkungan pada Industri Perkebunan Sawit Kalimantan Tengah”

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Perhitungan Biaya Akuntansi pada Industri Perkebunan, biaya-biaya apa saja yang boleh dibebankan ke biaya akuntansi lingkungan, dan kemudian akan dibebankan pada harga pokok produksi Industri Perkebunan khusus untuk Beban Tandan Buah Segar (TBS).

1.2 Permasalahan

Dari uraian latar belakang penelitian ini bahwa sebenarnya Industri perkebunan sawit sangat peduli pada Kerusakan Lingkungan dan Sosial masyarakat sekitarnya. Untuk memperhatikan hal tersebut maka Industri perkebunan sawit telah mengeluarkan biaya tidak sangat besar. Untuk permasalahan ini timbul didalam penulisan ini menguraikan bagaimana alur proses pencatatan akuntansi khususnya biaya akuntansi lingkungan di Industri Perkebunan Sawit. Dimulai proses pengeluaran biaya baik berupa biaya

operasional maupun pembelian Aset Perusahaan yang dipergunakan untuk mengatasi kerusakan lingkungan.

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan informasi kepada akademisi dan praktisi bagaimana fakta yang terjadi alur pencatatan biaya dan aktiva akuntansi lingkungan pada Industri Perkebunan Sawit.

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga alur akuntansi lingkungan, dan bagian materi sistem akuntansi.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan ini mempergunakan metode penelitian kualitatif, dimana hanya menguraikan fakta terjadi pada fakta sesungguhnya perusahaan Industri perkebunan Sawit didalam mengeluarkan biaya dan pembelian asset khusus untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Bagaimana pengelompokan biaya

lingkungan dan aktiva lingkungan didalam proses pelaporan keuangan.

Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung mencari sebuah fakta-fakta terjadi yang didapatkan dari hasil sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2014) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang masih alamiah (*natural setting*). Metode penelitian kwalitatif adalah merupakan Ilmu atau seni atau cara yang digunakan dalam memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan dengan urutan yang sistematis dan tata cara tertentu sesuai apa yang akan dikaji atau yang diteliti secara ilmiah, serta mempunyai tujuan (informasi).

Pendekatan kwalitatif yang dipergunakan didalam penelitian ini adalah fenomenolog. Adalah salah satu jenis pendekatan kualitatif dimana dalam pendekatan jenis ini peneliti melakukan

sebuah observasi kepada partisipan untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi dalam Proses Alur Pencatatan Akuntansi Lingkungan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengumpulan data oleh peneliti yang kemudian diolah untuk menemukan makna uraian akuntansi lingkungan didalam sebuah Perusahaan Industri Perkebunan Sawit. Observasi Langsung melihat alur proses pencatatan akuntansi lingkungan, dan Implementasi kerusakan lingkungan.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Metoda Perhitungan biaya Akuntansi Lingkungan

Didalam Kerusakan lingkungan disebabkan oleh Industri Perkebunan Sawit memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia, sosial dan keseimbangan ekosistem. Pada tahun 2004, High Level Threat Panel, Challenges and Change PBB, memasukkan degradasi lingkungan sebagai salah satu dari sepuluh

ancaman terhadap kemanusiaan. World Risk Report yang dirilis German Alliance for Development Works (Alliance), United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) dan The Nature Conservancy (TNC) pada 2012 pun menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya risiko bencana, perubahan iklim global, kesehatan manusia berada disekitarnya, dan pencemaran udara.

Lingkungan dimaksud didalam penelitian ini adalah kombinasi dari kondisi fisik meliputi keadaan sumber daya alam misalnya tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di darat dan di laut, dengan lembaga-lembaga yang mencakup penciptaan manusia sebagai keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik. Penyebab kerusakan alam disebabkan oleh ulah manusia merupakan penyebab tertinggi dan sangat berpengaruh daripada faktor alam yang terjadinya tidak setiap

hari. Banyak negara maju telah menaruh perhatian khusus terhadap kerusakan alam yang berakibat pada berubahnya iklim global, seperti penerbang hutan liar kemudian dijadikan Industri perkebunan sawit.

Adapun Profil Perusahaan PT.XYZ Grup sudah berdiri pada tahun 1994 sudah bergerak Industri Perkebunan Sawit terletak Kalimantan Tengah. Dimulai budidaya Kelapa Sawit sampai proses Produksi menjadi Minyak Kelapa Sawit. Perusahaan PT.XYZ memiliki 2 unit Pabrik yaitu Pabrik Pengolah Minyak Crude Palm Oil dan Palm Kernel Oil (PKO). Adapun produk yang dihasilkan terdiri dari Crude Palm Oil, Palm Kernel Oil, Minyak kotor, bungkil, dan ampas Tandan Buah Segar. Luas lahan PT. XYZ memiliki 150.000 Hektar, ada pun terdiri dari sebagai;

- a. Luas Tanaman Menghasilkan 85.500 hektar
- b. Luas Tanaman Belum Menghasilkan 25.500 hektar

c. Luas dalam proses perluasan 40.000 hektar

2. Flow dokumentasi Pencatatan Akuntansi Lingkungan

Perusahaan PT.XYZ sangat perhatikan lingkungan, kemasyarakatan dan kerusakan Lingkungan. Karena hal disebabkan oleh adanya pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional terhadap kerusakan Lingkungan. Bilamana terjadi kerusakan lingkungan, atau perusahaan tidak menjaga lingkungan sekitarnya. Perusahaan PT.XYZ akan mendapatkan hambatan dibidang Pemasaran terutama Ekspor ke Eropa, seperti Negara Belanda, Jerman, dan lainnya.

Untuk itu perusahaan PT.XYZ sangat perhatikan lingkungan sekitar Perkebunan Sawit, dan Masyarakat sekitarnya. Untuk memperhatikan hal tersebut tentu mengeluarkan sejumlah

anggaran biaya akuntansi lingkungan tidak sedikit.

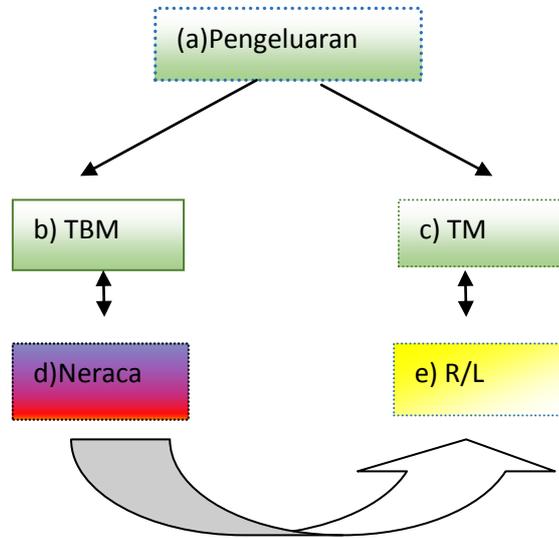
Semua Pencatatan biaya biaya berkaitan dengan lingkungan, Mobil-mobil bus bantuannya, sosial, masyarakat, sumbangan dan sebagainya di catat dalam akun Biaya akuntansi Lingkungan dan Aktiva Akuntansi Lingkungan.

Biaya biaya yang dikeluarkan tidak memiliki kaitan dengan beban Industri Perkebunan sawit, tidak ada kaitan dengan Industri Pengolahan Kelapa Sawit, dan berkaitan kerusakan lingkungan maka akan di catat sebagai Biaya akuntansi Lingkungan dan Aktiva Akuntansi Lingkungan. Biaya akuntansi Lingkungan akan dibebankan ke dalama Laporan Rugi Laba setiap periode dan kelompokan didalam Biaya Operasional khusus Biaya Administrasi dan Umum. Untuk Akun Aktiva Akuntansi Lingkungan dicatat dikelompok Neraca yaitu Aktiva Akuntansi Lingkungan apabila Tanaman Belum Menghasil (TBM), sedangkan bila tanaman sudah menghasilkan maka akan

beban penyusutan atau amortisasi kedalam kelompok Rugi Laba Perusahaan PT. XYZ
 Beban akuntansi Lingkungan didalam

Gambar 2.1

Flow Chart Pencatatan Akuntansi Lingkungan



Sumber: Pengolahan Sendiri

Keterangan :

- a) Pengeluaran adalah Pengeluaran berhubungan kekaitan biaya lingkungan.
- b) TBM adalah tanaman belum menghasilkan apabila biaya lingkungan tersebut berhubungan Tanaman Belum Menghasilkan
- c) TM adalah tanaman sudah menghasilkan apabila Tanaman

- sudah produksi Tandan Buah Segar (TBS).
- d) Neraca adalah Biaya tersebut dikelompok Aktiva akuntansi Lingkungan
- e) Rugi Laba adalah biaya akuntansi tanaman sudah menghasilkan Tandan Buah Segar,
- f) Aktiva akuntansi lingkungan adakan penyusutan

sebagaimana klasifikasi asset
aturan lingkungan.

3. Pengelompokan Aset dan Biaya Lingkungan.

Biaya merupakan hal yang pasti harus dikeluarkan dalam sebuah aktivitas perusahaan untuk memperoleh nilai ekonomis. Biaya dapat jadi ukuran nilai ekonomis atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa yang diharapkan akan membawa manfaat sekarang atau masa depan bagi organisasi baik jangka pendek, menengah dan jangka Panjang. Manfaat jangka pendek kemungkinan Perusahaan akan mencatat didalam beban langsung dipostingkan ke Laporan Rugi Laba, sedangkan manfaat jangka Panjang mungkin catat dalam Aktiva Perusahaan, kemudian penggunaan akan disusutkan dalam periode akuntansi yang telah diputuskan oleh perusahaan.

Perusahaan Industri perkebunan sawit PT.XYZ mempunyai didalam catatan akuntansi lingkungan berdiri sendiri. Karena akuntansi Lingkungan tidak ada efek langsung proses pemeliharaan tanaman, dan peningkatan laba secara langsung. Akuntansi lingkungan berkaitan efek jangka Panjang. Untuk pengeluaran biaya-biaya lingkungan berkaitan untuk menjaga kerusakan lingkungan Perusahaan mempunyai sebuah catatan Akuntansi Lingkungan. Didalam pencatatan akuntansi dapat dikelompok 2 bagian yaitu;

- a. Beban akuntansi lingkungan
- b. Aset aktiva lingkungan.

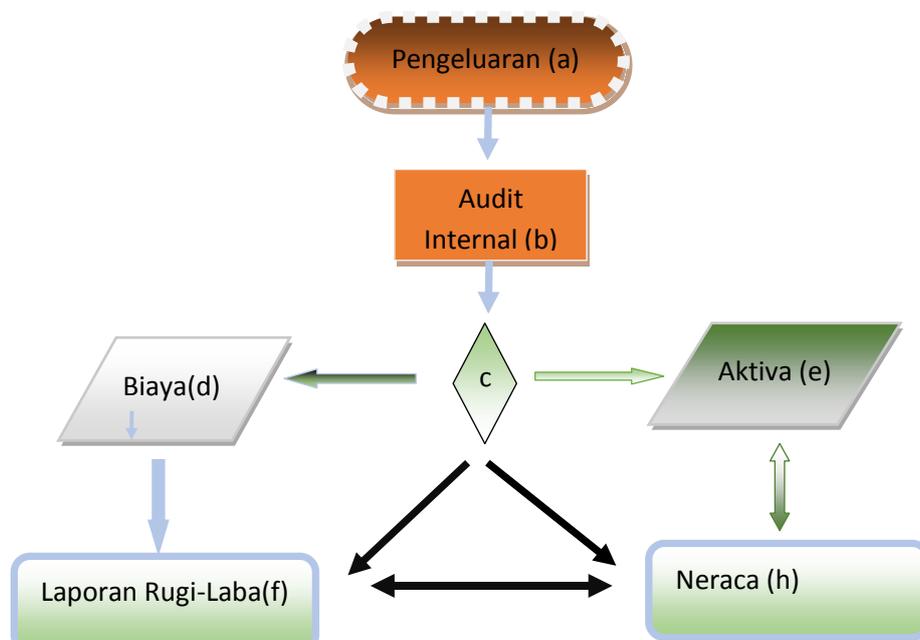
Beban Akuntansi Lingkungan adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan, dan mempunyai manfaat pendek dan mempunyai satuan nilai ekonomis, untuk menjaga atau mengatasi kerusakan lingkungan Perusahaan Industri Perkebunan Sawit. Untuk aktiva

lingkungan adalah Pembelian mesin-mesin, mobil, bangunan penjaga kebakaran, alat-alat pergunakan untuk mengatasi lingkungan dan lainnya. Yang tidak berhubungan langsung jangka pendek, tapi akan bermanfaat dalam jangka pendek dan Panjang untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Contoh Perusahaan Industri Perkebunan XYZ aktiva akuntansi lingkungan, seperti Mobil Pemadam kebakaran (*Fire Truck*) kapasitas 5.000 liter, alat deteksi kebakaran, dan seterusnya. Semua

pembelian tersebut dikaitkan dalam aktiva akuntansi lingkungan. Kemudian disusutkan berdasarkan periode akuntansi berdasarkan waktu pembelian aktiva lingkungan.

Unuk melihat penjelasan tersebut, dapat dilihat pada gambar 2.2 Diagram Biaya dan Aktiva Akuntansi Lingkungan. Proses memilah mana biaya dan aktiva dimulai saat melihat nilai ekonomis, manfaat biaya berkaitan jangka pendek, jangka pendek dan jangka Panjang Industri Perkebunan Sawit PT.XYZ

Gambar 2.2
Biaya dan Aktiva akuntansi Lingkungan



Sumber: Pengolahan Sendiri

Keterangan :

- a) Pengeluaran adalah Pengeluaran berhubungan kekaitan biaya lingkungan melalui kas/bank/utang
- b) Internal audit adalah diperiksa berdasarkan penggunaan dan pengelompok biaya atau asset berkaitan pemeliharaan lingkungan atau tidak.
- c) Kemudian memilah dan mengambil keputusan atas pengelompok biaya atau aktiva lingkungan
- d) Biaya mengelompok biaya bila diambil keputusan pengeluaran berdasarkan minimalisasi ukuran nilai rupiah
- e) Aktiva mengelompok biaya berdasarkan miimalisasi, kemudian melihat fungsi pembelian tersebut.
- f) Bila biaya diposting ke Laporan Rugi Laba.

g) Bila aktiva dipostingkan ke Neraca, lalu kemudian disusutkan biaya penyusuta/amortisasi ke Laporan Rugi.

4. Perbandingan biaya Akuntansi Lingkungan dan Aktiva Akuntansi Lingkungan.

Di dalam fakta sesungguhnya yang terjadi bahwa perusahaan Industri Perkebunan sawit PT.XYZ sampai saat belum mempunyai standar baku proses pencatatan akuntansi lingkungan, pengukuran, menghitung dan sampai bagaimana membuat laporan akuntansi keuangan. Untuk saat ini perusahaan Industri Perkebunan sawit PT.XYZ dalam proses pencatatan biaya-biaya lingkungan atau aset lingkungan masih mempergunakan kebiasaan umum yang dilakukan oleh perusahaan Industri Perkebunan Sawit yang lainnya. Lazimnya bilamana terjadinya

pengeluaran biaya-biaya pemeliharaan lingkungan atau biaya-biaya yang berkaitan dengan lingkungan dan pembelian aset aset yang dipergunakan

untuk pemeliharaan lingkungan seperti pembelian mobil kebakaran, dan seterusnya. Untuk lebih jelas biaya tersebut dapat diperlihat pada table 2.1

TABEL 2.1

Perbandingan TBM, TM dan Biaya Lingkungan Tahun 2008 sd 2014 (dalam jutaan Rp)

No	Tahun	Total			%tase
		TBM	TM	Lingkungan	
1	2008	283,053.45	337,893.12	6,822.60	2.02%
2	2009	312,671.82	346,015.61	25,105.44	7.26%
3	2010	328,228.62	370,679.61	37,708.18	10.17%
4	2011	369,374.89	404,554.44	43,351.40	10.21%
5	2012	375,137.99	438,747.26	68,433.00	14.76%
6	2013	338,795.10	460,556.28	92,034.88	18.95%
7	2014	302,716.72	496,635.06	115,334.72	22.11%

Sumber : PT.XYZ.

5. Kesimpulan

- a. PT.XYZ sudah mengeluarkan biaya kerusakan lingkungan, kemudian dikelompok didalam aktiva akuntansi lingkungan dan beban akuntansi lingkungan didalam kelompok keuangan.
- b. Untuk menjaga kestabilan Perusahaan Industri Perkebunan dan Pemasaran hasil Produksi diperlukan untuk memelihara lingkungan. Ini

bukti fakta nyata Perusahaan Industri Perkebunan Sawit sangat konservatif terhadap kerusakan Lingkungan.

- c. Penelitian ini merupakan sebuah proses fenomena terjadi pada Perusahaan industry Perkebunan dalam rangka mengatasi pembatasan Pemasaran CPO (*Crude Palm Oil*) di Eropa pada wahana pencinta Lingkungan.

- d. Penelitian kualitatif berdasarkan obaservasi partisipasi, dan langsung melihat sebuah proses pencatatan akuntansi lingkungan, dan pada lingkungan sekitar Industri Sawit. Masih adanya kelemahan dengan berbagai asumsi.
- e. Diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan pada Perusahaan Industri Perkebunan yang berbeda lokasi, dan jenis Industri yang lainnya berkaitan dengan kerusakan Lingkungan.
- f. Hasil kajian ilmiah ini agar dapat membuat pengaturan kerusakan lingkungan untuk Industri Perkebunan Sawit dalam masyarakat perlu diatur dalam satu undang-undang khusus yaitu Undang-Undang tentang Akuntansi Lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah AZ, Salamatinia B, Mootabadi H, Bhatia S, (2009). Current status and policies on biodiesel industry in Malaysia as the world's leading producer of palm oil. *Energy Policy* 37 (2009) 5440-5448.
- Agus F, Santosa I, Dewi P, Setyanto P, Thamarin S, Wulan YC, Suryaningrum F. (2013), *Pedoman Teknis Perhitungan Baseline Emisi dan Serapan Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan; Buku I Landasarn Ilmiah*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta.
- Ahrens, T. & Chapman, C.S (2006) *“Doing qualitative field research in management accounting: Positioning data to contribute to theory”*

- Accounting, Organizations and Society, Elsevier. 0361-3682/S
- Allen, B. (2009) Agricultural development, policies and governance. Page 425-488 in R.M. Bourke. T. Harwood, editor, *Food and agriculture in Papua New Guinea*. The Australian National University, Canberra.
- Arfan Ikhsan (2008). *Akuntansi Lingkungan & Pengungkapannya*, Percetakan Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal 6-9.
- Dja'far, N. Ranawati dan M. Akimal, (2005). *Pedoman Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) tentang Prinsip dan Kriteria Sustainable Palm Oil pada Industri Kelapa Sawit*, Jurnal Penelitian Kelapa Sawit 13(2):85-110. Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan.
- Elkington, J. (1999), *Cannibals With Forks—The Triple Bottom line of 21st Century Business*, Capstone Publishing, Oxford.
- Fess, Philip E., Warren Carls S., (1990), *Accounting Principles; 16th Edition*, Cincinnati: South Western Publishing Co.
- German, L. dan Schoneveld, G. (2012), *A review of social sustainability considerations among EU-Approved voluntary schemes for biofuels, with implications for rural livelihoods*, Energy Policy (in press). USA
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup*, diundangkan Jakarta pada tanggal 19 September 1997 Sekretariat Negara RI Jakarta.

Samekto, Adji FX (2009) *Dampak Industri unggulan terhadap kerusakan dan perubahan lingkungan*, <http://megapolitan.kompas.com/read/2009/12/03/21301549/penegakan.hukum.lingkungan.lemah>, tanggal 3 Desember 2009.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.

Tinker, T. dan Gray, R. (2003), *Beyond a critique of pure reason: from policy to politics to praxis in environmental and social research*, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 16 No. 5, pp. 727-61.

Trisnayannis Desty. (2014). *Akuntansi Internasional l- Brunei Darussalam (ASIA)*. Diakses dari <http://destytrisnayannis.blogspoto>

t.com/2014/04/akuntansi-internasional-brunei-darussalam-asia.html.

Undang Undang

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan*, diundangkan Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2004 Sekretariat Negara RI Jakarta.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*. diundangkan Jakarta pada tanggal 17

Oktober 2014 Menteri Hukum
dan Hak Asasi RI Jakarta.

Alexander Candra Adalah
Anggota Ikatan Konsultan Pajak
Indonesia (IKPI) dan Kandidat
Doktor Ilmu Ekonomi M. Imam
Sundarta Adalah Dosen Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas
Ibn Khaldun Bogor